



Rp65 M Hangus Imbas Efisiensi Anggaran

# Rp65 M Hangus Imbas Efisiensi Anggaran

Untuk Jalan dan Jembatan

REPORTER  
**ASHARI P NEGARA**  
EDITOR  
**RIDWAN MARZUKI**

**BONE, FAJAR** – Pemda meringis. Efisiensi membuat anggaran infrastruktur tak kukur.

**PEMANGKASAN** anggaran di Kabupaten Bone berdampak ke berbagai sektor, termasuk di antaranya sektor jalan dan jembatan. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) tak menampik hal ini.

Memang pemangkasan ini seyogianya belum sampai ke pemda, hanya saja jika ini betul-betul diterapkan, maka kemungkinan pengerjaan jalan dan jembatan akan sulit terealisasi tahun ini.

"Intinya pasti mengganggu, tapi kita tidak tahu juga dengan kebijakan ini, apakah ini akan dianu (dikembalikan) kembali," ujar Kepala

pala BMCKTR Bone, Askar, pekan lalu.

Dari informasi yang dihimpun, pada 2025 BMCKTR telah mengusulkan pengerjaan untuk tiga ruas jalan dan satu jembatan. Keempat proyek ini berpotensi batal diajukan akibat efisiensi anggaran.

Hanya saja Askar belum merinci. Kendati demikian, salah satu jalan tersebut adalah pengerjaan 2 kilometer konektivitas jalan terdampak bandara yang menjadi akses Desa Mapalo Ulaweng, Unra, Kajujara, dan Cari Gading di Kecamatan Awangpone, Bone.

"Pasti mengganggu, kan,

fisiknya. Saya belum tahu terkait rincian data ini. Kita akan lihat kembali," sambungnya.

## Angka Besar

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bone Ade Fariq Ashar merinci besaran anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk jalan yang dipangkas itu sebesar Rp65,3 miliar

"Besarnya yaitu Rp65.326.729.000 (Rp65,3 miliar). Rinciannya, layanan dasar sebesar Rp43.771.909.000, dan tematik kawasan produksi pangan nasional (KPPN) sebesar Rp21.554.882.000,"

ujar Ade.

Kemudian ada pula DAK irigasi sebesar Rp10,4 miliar, di sektor lain di DAK fisik pertanian sebesar Rp8 miliar, dan DAK fisik pangan akuratik sebesar Rp13,5 miliar.

Selain program DAK fisik, juga ada Dana Alokasi Umum (DAU) earmarking bidang PU yang ikut dipangkas pusat. "Itu rinciannya sebesar Rp38.188.846.000 yang ikut dipangkas," sambung Ade.

Imbas pemangkasan ini, pemerintah harus tetap bisa mengoptimalkan terkait dengan pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran yang tentunya tetap ber-

kesesuaian dengan harapan dan instruksi dari pusat.

"Makanya pemerintah pusat untuk pengajuan RKPD itu dimajukan di bulan lima untuk sesuaikan kebijakan," ujarnya.

Meski demikian efisiensi ini masih dalam tahapan proses yang artinya belum final. Masih akan ada beberapa inpres yang akan lahir di belakang, bukan hanya no 1 saja.

"Kita tidak tahu ke depannya, apalagi sudah ada Inpres No 2, sudah ada PMK No 29. Jadi sambil tunggu itu, kita harap ada lahir dari Permendagri untuk atur ini juknisnya," tegasnya. (\*)